



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Supriyatna
Jabatan : Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Bambang Prasetya

I Nyoman Supriyatna



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder Perspectives		
1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1 % Industri Produk Unggulan Nasional (PUN) ber-SNI yang memenuhi syarat di negara tujuan ekspor	5 %
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatkan pengelolaan standardisasi	2 Jumlah SNI yang ditetapkan	10059 SNI
3 Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	3 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	750 rekomendasi
	4 Jumlah rancangan Pedoman terkait pengembangan SNI	2 rancangan
	5 Jumlah SNI yang di kaji ulang	400 SNI
4 Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	6 Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550 orang
	7 Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	40 komtek
5 Meningkatkan pengelolaan kerja sama internasional	8 % kerjasama dengan badan/ organisasi standardisasi internasional yang ditindaklanjuti	100 %
	9 % kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang ditindaklanjuti	80 %
6 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi	10 % kerjasama dengan instansi lain yang ditindaklanjuti	80 %
7 Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut & implementasi kesepakatan kerjasama	11 % tindak lanjut & implementasi kesepakatan kerjasama yang harus dipenuhi	80 %
	12 Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP	10 kerjasama
8 Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	13 % Permintaan layanan notifikasi regulasi teknis dapat ditangani	100 %
	14 % Pertanyaan (enquiry) yang dapat ditanggapi	100 %
	15 Jumlah Inquiry Indonesia terhadap notifikasi regulasi dari Negara lain	11 inquiry



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9 Meningkatkan penelitian & pengembangan standardisasi	16 Jumlah hasil kajian/ penelitian yang diadopsi atau menjadi acuan proses pengembangan SNI	5 rekomendasi
	17 Jumlah kajian/penelitian yang mendukung penerapan standar/ penilaian kesesuaian	1 rekomendasi
Learning and Growth Perspectives		
10 Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Deputi PKS	18 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	83 nilai
	19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
	20 Nilai kepatuhan layanan publik	104 nilai
11 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Deputi PKS	21 % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
	22 Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1 orang
12 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Deputi PKS	23 % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
	24 % Pemanfaatan BMN	100 %
13 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Deputi PKS	25 % Realisasi Anggaran	≥95 %

Program
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional

Anggaran (Rp.)
16,455,107,000

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

I Nyoman Supriyatna